

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badrudin. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Campbell, H. B. (1990). *Black's Law Dictionary* (Edisi VI). West Publishing: St. Paul Minnesota.
- Chaerudin, & Dkk. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Chandra, E., & Dkk. (2003). *Membangun Forum Warga "Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil"*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Ermansyah Djaja.
- Dwiyanto, A., & Dkk. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.
- Handoko, H. T. (2000). *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Maruti, S. K. (2013). *Responsivitas Pelayanan Kantor Pertahanan Kota Salatiga*. Surakarta: Pascasarjana UNS.
- Nogis, H. S. T. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Rukmini, M. (2010). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Edisi kedua). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Satries, W. (2011). Efektivitas Program Pemberdayaan Pemuda Pada Organisasi Kepemudaan Al Fatih Ibadurrohman Kota Bekasi. *Thesis*.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Government (Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Simamora, S. (2013). *Hukum Kontrak: Kontak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan di Indonesia*. Surabaya: Wins & Partners Law Firm dan Lbj.
- Slamet, Y. (1993). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* (1st ed.). Surakarta: Sebelas Maret University Press.

- Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana* (Cetakan ke). Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-22). Bandung: Alfabeta. Hal. 224.
- Suryabrata, S. (1983). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2012). *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahayani, Z. (2017, Desember). Korupsi Pengadaan Brang dan Jasa di Indonesia. Jakarta , Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.
- Rochmah, S. (2013). *Responsivitas Pelayanan Studi Pada Kebijakan Pelayanan Air Bersih*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Theresia, A., & Dkk. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Usman Setiadi, E. M. (2013). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Yuliani, S. (2006). Korupsi Birokrasi : Faktor Penyebab dan Penanggulangannya. *Dinamika*, 6(1).

Jurnal dan Artikel:

- Ardhyanasari, A. (n.d.). *Masyarakat Melawan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from Anti-Corruption Clearing House AACH:
<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=853:masyarakat-melawan-tindak-pidana-korupsi>
- Nawatmi S. (2014). Korupsi dan Pertumbuhan Ekonom Negara-Negara Asia Pasifik. *Jurnal Bisnis Dan Eonomi (JBE)*, 21(1), 73–82.
- Sri Hartati, N. H. (2013). Kinerja Organisasi Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sitang. *Jurnal Tesis PMSI-UNTAN-PSIAN*.

- Supriyono, B. (2001). Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 20.
- Sutrisno, B. (2012, Januari 10). *Peran Masyarakat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved Februari 15, 2019, from Lawang Post: <http://www.lawangpost.com/read/peranan-masyarakat-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah/1844/#ixzz5frHHoBtq>
- Wahidin. (2018, Januari 16). *Tanamkan Kesadaran Anti Korupsi pada Generasi Muda, Ini Yang Dilakukan Kejari Sintang*. Retrieved Februari 25, 2019, from Tribun Pontianak: <http://pontianak.tribunnews.com/2018/01/16/tanamkan-kesadaran-anti-korupsi-pada-generasi-muda-inilah-yang-dilakukan-kejari-sintang>
- Wibowo, R. A. (2015, Desember 11). *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?)*. Retrieved Desember 25, 2018, from ACCH (Anti-Corruption Clearing House): <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi-pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan>
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman. *Jurnal ComTech*, 4(1), 27. Retrieved from <http://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/article/view/2679>
- Zulkifli. (2015, May). Kejari Sintang Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Hand Tractor. *Tribun Pontianak*. Retrieved from <http://pontianak.tribunnews.com/2015/05/11/kejari-sintang-tetapkan-dua-tersangka-korupsi-hand-tractor> (diakses pada tanggal 27 November 2018, Pukul 14:38)
- AACH, A.-C. C. (2015, Desember 11). *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa Yang Sudah dan Yang Masih Harus Dilakukan?)*. Retrieved Maret 3, 2019, from Anti-Corruption Clearing House (AACH): <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/mencegah-korupsi->

pengadaan-barang-jasa-apa-yang-sudah-dan-yang-masih-harus-dilakukan.

Admin. (2019, Maret 4). *Program Sintang Menyapa Saluran Komunikasi Antara Pemkab Sintang dengan Masyarakat*. Retrieved April 2, 2019, from Suara Kapuas Raya : <http://www.suarakapuasraya.com/program-sintang-menyapa-saluran-komunikasi-antara-pemkab-sintang-dengan-masyarakat>.

Admin. (2018, Juli 3). *Tangani Tipikor. Aparat Hukum Harus Koordinasi dengan APIP*. Retrieved from Nitizen Media: <https://netizen.media/2018/07/03/tangani-tipikor-aparat-hukum-harus-koordinasi-dengan-apip/>

Bagian Layanan Pengadaan. (2018, Maret 19). *10 Poin Penting Perbedaan Perpres No. 16 Tahun 2018 dengan Perpres No. 54 Tahun 2010*. Retrieved Maret 1, 2019, from Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Buleleng <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/10-poin-penting-perbedaan-perpres-no-16-tahun-2018-dengan-perpres-no-54-tahun-2010-16>

BPS. (2017). *Kabupaten Sintang Dalam Angka*. Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

UNODC), U. N. (2013). *Guide Book on Anti Corruption in Public Procurement and the management of public finances*.

Word Bank. (1997). *Helping Countries Combat Corruption. The Role Of the Word Bank*

Peraturan:

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nrgara dan Refor,asi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Inegritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001